



**MENTERI KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional serta perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu penyesuaian hasil evaluasi jabatan terhadap kelas jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. bahwa penyesuaian hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 179);

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan, dan pembangunan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan yang dibayarkan sesuai dengan capaian kinerja.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

## BAB II

### JABATAN DAN KELAS JABATAN

#### Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi, yang terdiri atas:
    1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
    2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

- b. Jabatan Administrasi, yang terdiri atas:
    - 1. Jabatan Administrator;
    - 2. Jabatan Pengawas; dan
    - 3. Jabatan Pelaksana, dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat jabatan lainnya di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- (3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional didasarkan pada:
  - a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional; atau
  - b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional.

### BAB III

#### TUNJANGAN KINERJA

#### Pasal 5

Selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga dapat diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 610) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1357), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2022

MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH

DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI,  
JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Sekretaris Kementerian	17
2	Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur	15
3	Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Penganggaran	13
4	Kepala Subbagian Program Perkoperasian dan Kewirausahaan	10
5	Kepala Subbagian Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	10
6	Kepala Subbagian Penganggaran	10
7	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	13
8	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Program Perkoperasian dan Kewirausahaan	10
9	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	10
10	Kepala Subbagian Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja	10



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
11	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur	13
12	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	10
13	Kepala Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	10
14	Kepala Subbagian Tata Kelola Jabatan Fungsional	10
15	Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	13
16	Kepala Subbagian Organisasi	10
17	Kepala Subbagian Tata Laksana	10
18	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi	10
19	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	15
20	Kepala Bagian Perundang-undangan	13
21	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian dan Kewirausahaan	10
22	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	10
23	Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum	13
24	Kepala Subbagian Advokasi dan Publikasi Hukum	10
25	Kepala Subbagian Penelaahan Hukum	10
26	Kepala Bagian Kerja Sama	13
27	Kepala Subbagian Perencanaan Kerja Sama	10
28	Kepala Subbagian Administrasi Kerja Sama	10
29	Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi	15
30	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	13
31	Kepala Subbagian Dokumentasi	10
32	Kepala Subbagian Publikasi dan Hubungan Media	10
33	Kepala Subbagian Literasi dan Pustaka	10
34	Kepala Bagian Teknologi Informasi	13
35	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sistem dan Jaringan	10
36	Kepala Subbagian Perangkat Lunak dan Layanan Teknologi Informasi	10

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
37	Kepala Bagian Komunikasi dan Aspirasi Publik	13
38	Kepala Subbagian Komunikasi Publik	10
39	Kepala Subbagian Aspirasi Publik	10
40	Kepala Biro Umum dan Keuangan	15
41	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara	13
42	Kepala Subbagian Sarana, Prasarana, dan Pemeliharaan	10
43	Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara	10
44	Kepala Subbagian Keamanan dan Ketertiban	10
45	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	13
46	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri	10
47	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian	10
48	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri	10
49	Kepala Subbagian Protokol	10
50	Kepala Subbagian Arsip dan Persuratan	10
51	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	13
52	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	10
53	Kepala Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Pengadaan Barang/Jasa	10
54	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10
55	Kepala Bagian Keuangan	13
56	Kepala Subbagian Verifikasi	10
57	Kepala Subbagian Perbendaharaan	10
58	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	10
59	Deputi Bidang Perkoperasian	17
60	Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian	15
61	Kepala Bagian Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Deputi Bidang Perkoperasian	13
62	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian	10
63	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Deputi Bidang Perkoperasian	10
64	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Deputi Bidang	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Perkoperasian	
65	Kepala Subbagian Umum Deputi Bidang Perkoperasian	10
66	Kepala Subbagian Keuangan Deputi Bidang Perkoperasian	10
67	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian	15
68	Kepala Bidang Pengembangan Perkoperasian	13
69	Kepala Bidang Pembaruan Perkoperasian	13
70	Asisten Deputi Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi	15
71	Kepala Bidang Pembiayaan Perkoperasian	13
72	Kepala Bidang Permodalan dan Penjaminan Perkoperasian	13
73	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi	15
74	Kepala Bidang Kepatuhan dan Sistem Pelaporan Koperasi	13
75	Kepala Bidang Pemeriksaan Koperasi	13
76	Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	15
77	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkoperasian	13
78	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Perkoperasian	13
79	Deputi Bidang Usaha Mikro	17
80	Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro	15
81	Kepala Bagian Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Deputi Bidang Usaha Mikro	13
82	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Deputi Bidang Usaha Mikro	10
83	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Deputi Bidang Usaha Mikro	10
84	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Deputi Bidang	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Usaha Mikro	
85	Kepala Subbagian Umum Deputi Bidang Usaha Mikro	10
86	Kepala Subbagian Keuangan Deputi Bidang Usaha Mikro	10
87	Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro	15
88	Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro	13
89	Kepala Bidang Penguatan Permodalan Usaha Mikro	13
90	Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro	15
91	Kepala Bidang Kemudahan Usaha Mikro	13
92	Kepala Bidang Perlindungan Usaha Mikro	13
93	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro	15
94	Kepala Bidang Standardisasi Produksi Usaha Mikro	13
95	Kepala Bidang Jaringan Pemasaran Usaha Mikro	13
96	Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro	15
97	Kepala Bidang Pelatihan dan Pendampingan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro	13
98	Kepala Bidang Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro	13
99	Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha	15
100	Kepala Bidang Fasilitasi Hukum	13
101	Kepala Bidang Konsultasi Usaha	13
102	Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah	17
103	Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah	15
104	Kepala Bagian Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah	13
105	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah	10

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
106	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah	10
107	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah	13
108	Kepala Subbagian Umum Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah	10
109	Kepala Subbagian Keuangan Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah	10
110	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dan Menengah	15
111	Kepala Bidang Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah	13
112	Kepala Bidang Investasi Usaha Kecil dan Menengah	13
113	Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Kecil dan Menengah	15
114	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah	13
115	Kepala Bidang Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina Usaha Kecil dan Menengah	13
116	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah	15
117	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Usaha Kecil dan Menengah	13
118	Kepala Bidang Pengembangan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah	13
119	Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah	15
120	Kepala Bidang Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah	13
121	Kepala Bidang Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah	13
122	Deputi Bidang Kewirausahaan	17
123	Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
124	Kepala Bagian Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Deputi Bidang Kewirausahaan	13
125	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Deputi Bidang Kewirausahaan	10
126	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Deputi Bidang Kewirausahaan	10
127	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Deputi Bidang Kewirausahaan	13
128	Kepala Subbagian Umum Deputi Bidang Kewirausahaan	10
129	Kepala Subbagian Keuangan Deputi Bidang Kewirausahaan	10
130	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan	15
131	Kepala Bidang Konsultasi Bisnis	13
132	Kepala Bidang Pendampingan Usaha	13
133	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi Usaha dan Inkubasi Wirausaha	15
134	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Usaha	13
135	Kepala Bidang Pengembangan Inkubasi Wirausaha	13
136	Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis	15
137	Kepala Bidang Peningkatan Peran Dunia Usaha, Industri, dan Pendidikan	13
138	Kepala Bidang Peningkatan Peran Pemerintah	13
139	Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha	15
140	Kepala Bidang Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif	13
141	Kepala Bidang Permodalan Wirausaha	13
142	Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha	15
143	Kepala Bidang Pemetaan Data	13
144	Kepala Bidang Analisis dan Pengkajian Usaha	13
145	Inspektur	15
146	Kepala Bagian Perencanaan dan Umum Inspektorat	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
147	Kepala Subbagian Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Inspektorat	10
148	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	10

B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
2	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
4	Arsiparis Ahli Muda	9
5	Arsiparis Ahli Pertama	8
6	Arsiparis Mahir	7
7	Arsiparis Terampil	6
8	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
9	Auditor Ahli Utama	13
10	Auditor Ahli Madya	11
11	Auditor Ahli Muda	9
12	Auditor Ahli Pertama	8
13	Dokter Ahli Pertama	9
14	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
15	Peneliti Ahli Utama	14
16	Penerjemah Ahli Pertama	8
17	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
18	Perencana Pertama	8
19	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
21	Pustakawan Muda	9
22	Pustakawan Ahli Pertama	8
23	Statistisi Muda	9
24	Statistisi Ahli Pertama	8
25	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
26	Pengawas Koperasi Ahli Utama	14
27	Pengawas Koperasi Ahli Madya	12
28	Pengawas Koperasi Ahli Muda	10
29	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	8
30	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
31	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
32	Auditor Kepegawaian Pertama	8
33	Penyuluh Hukum Pertama	8
34	Perawat Terampil	6

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAINNYA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro	16
2	Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing	16
3	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	16
4	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7
5	Analisis Manajemen Risiko	7
6	Analisis Perencanaan Anggaran	7
7	Pemeriksa Anggaran	7
8	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
9	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7
10	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7
11	Analisis Pengembangan Karir	7
12	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
13	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
14	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7
15	Penyusun Rencana Mutasi	7
16	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
17	Analisis Pengembangan Jabatan	7
18	Penyusun Bahan Kebijakan	7
19	Analisis Organisasi	7
20	Analisis Tata Laksana	7
21	Penyusun dan Pengolah Instrumen	7
22	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
23	Analisis Advokasi Hukum	7
24	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	7
25	Analisis Permasalahan Hukum	7
26	Analisis Kerja Sama	7
27	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7
28	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7
29	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	7
30	Analisis Pelayanan	7
31	Analisis Publikasi	7
32	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	7
33	Analisis Sistem Informasi	7
34	Pengendali Teknologi Informasi	7
35	Analisis Konten Media Sosial	7
36	Analisis Informasi	7
37	Analisis Pengaduan Masyarakat	7
38	Analisis Pelayanan Publik	7
39	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
40	Penata Kendaraan Dinas	7
41	Pengembang Sarana dan Prasarana	7
42	Analisis Kesehatan	7
43	Analisis Barang Milik Negara	7
44	Kustodian Barang Milik Negara	7
45	Penata Teknis Pengamanan	7
46	Analisis Tata Usaha	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
47	Analisis Ekonomi Makro	7
48	Analisis Protokol	7
49	Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar	7
50	Analisis Penagihan	7
51	Analisis Perbendaharaan	7
52	Analisis Remunerasi	7
53	Analisis Pajak	7
54	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	7
55	Penata Laporan Keuangan	7
56	Analisis Layanan Umum	7
57	Analisis Koperasi	7
58	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	7
59	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis	7
60	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	7
61	Analisis Strategi Pembiayaan	7
62	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	7
63	Analisis Diklat	7
64	Penyuluh Koperasi	7
65	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur	7
66	Fasilitator Kemitraan	7
67	Analisis Kerjasama Teknis Standardisasi	7
68	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil, dan Menengah	7
69	Analisis Pemasaran dan Kerjasama	7
70	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	7
71	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7
72	Analisis Bahan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja	7
73	Penelaah Pengembangan Usaha	7
74	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7
75	Analisis Bimbingan Usaha	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
76	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	7
77	Penata Keuangan	7
78	Analisis Penataan Kawasan	7
79	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	7
80	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	7
81	Analisis Kemitraan	7
82	Fasilitator Promosi	7
83	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	7
84	Fasilitator Kewirausahaan	7
85	Analisis Ekonomi Kreatif	7
86	Analisis Dunia Usaha	7
87	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	7
88	Analisis Sinergitas Penugasan Urusan Pemerintah	7
89	Analisis Data dan Informasi	7
90	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
91	Fasilitator Sarana Pemasaran	7
92	Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Besar	7
93	Pengelola Bahan Perencanaan	6
94	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	6
95	Pengelola Pemantauan	6
96	Pengelola Data	6
97	Pengelola Disiplin Pegawai	6
98	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6
99	Pengolah Data Informasi dan Hukum	6
100	Pengelola Terjemahan dan Kerjasama	6
101	Pengelola Administrasi Kerjasama Luar Negeri	6
102	Pengelola Dokumentasi	6
103	Pranata Fotografi	6
104	Pengolah Informasi Media	6
105	Operator Komputer Grafis	6
106	Pengelola Bahan Pustaka	6
107	Pengelola Situs atau Web	6

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
108	Pengelola Sistem dan Jaringan	6
109	Pengelola Database	6
110	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6
111	Pengelola Barang Persediaan	6
112	Pengelola Poliklinik	6
113	Pengadministrasi Barang Milik Negara	6
114	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6
115	Ajudan	6
116	Pengelola Perjalanan Dinas	6
117	Pengelola Surat	6
118	Sekretaris	6
119	Petugas Protokol	6
120	Pranata Barang dan Jasa	6
121	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6
122	Verifikator Keuangan	6
123	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	6
124	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6
125	Pranata Koperasi	6
126	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6
127	Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum	6
128	Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop	6
129	Pengolah Data	6
130	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
131	Pengadministrasi Kepegawaian	5
132	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang- Undangan	5
133	Teknisi Jaringan Instalasi	5
134	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
135	Pemelihara Kendaraan	5
136	Teknisi Peralatan dan Mesin	5
137	Operator Mesin	5
138	Pramu Bakti	5

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
139	Pengadministrasi Persuratan	5
140	Pengadministrasi Keuangan	5
141	Pengadministrasi Umum	5
142	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	5
143	Pengemudi	3
144	Petugas Keamanan	3

MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001